

KATEGORI

Perekonomian

SUB KATEGORI

Keuangan Daerah

NAMA INDIKATOR

Belanja Publik terhadap total APBD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD))

TAHUN

2017

KONSEP

- **Belanja Publik terhadap Total APBD** adalah besarnya belanja yang digunakan untuk belanja publik terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- **Belanja Publik adalah** belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Belanja Pelayanan Publik dapat berupa: Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Rupiah

UNIT

Kepala Dinas Sosial

KEGUNAAN

Untuk mengetahui belanja publik terhadap total Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah di suatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Belanja Publik terhadap Total APBD menunjukkan besarnya belanja yang digunakan untuk belanja publik terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD

